



PEMERINTAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

**RENCANA  
PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG  
(RPJP)**

**KABUPATEN MUARA ENIM  
2005 - 2025**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, Arah dan Tahapan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Selatan.
  - b. bahwa Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang. ....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005-2025.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Kabupaten Muara Enim, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Muara Enim, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Muara Enim serta memperhatikan RPJP Propinsi Sumatera Selatan.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA RPJP KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005-2025**

#### **Pasal 2**

Sistematika RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : KONDISI UMUM**

**BAB III : VISI, MISI, SASARAN, ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN**

**BAB IV : PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Isi dan uraian RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud Pasal 2, selengkapnya terdapat pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaannya RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, perlu dijabarkan kedalam RPJM Kabupaten Muara Enim untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 7 AGUSTUS 2008

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
Pada Tanggal 15 AGUSTUS 2008



ABDUL WAHAB MAHARIS

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR GAMBAR

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1.	Latar Belakang .....	I-1
1.2.	Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3.	Landasan Hukum .....	I-3
1.4.	Hubungan RPJP Kab. Muara Enim dengan Dokumen Perencanaan lainnya .....	I-5
1.5.	Alur Pikir.....	I-7
1.6.	Sistematika Penulisan.....	I-7
<b>BAB II</b>	<b>KONDISI UMUM.....</b>	<b>II-1</b>
II.1.	Kondisi Saat Ini .....	II-2
	A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama .....	II-2
	B. Ekonomi.....	II-8
	C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	II-16
	D. Sarana dan Prasarana.....	II-17
	E. Politik dan Demokrasi .....	II-23
	F. Keamanan .....	II-25
	G. Hukum dan Aparatur.....	II-26
	H. Wilayah dan Tata Ruang .....	II-29
	I. Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	II-32
II.2.	Tantangan.....	II-34
	A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama .....	II-34
	B. Ekonomi.....	II-35
	C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	II-38
	D. Sarana dan Prasarana.....	II-40

E. Politik .....	II-42
F. Keamanan .....	II-43
G. Hukum dan Aparatur.....	II-45
H. Wilayah dan Tata Ruang .....	II-46
I. Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	II-50
II.3. Modal Dasar.....	II-52
<b>BAB III VISI, MISI, SASARAN, ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN.....</b>	<b>III-1</b>
III.1. Visi .....	III-1
III.2. Misi.....	III-2
III.3. Sasaran.....	III-3
III.4. Arah Pembangunan .....	III-4
III.5. Tahapan Pembangunan.....	III-7
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>IV-1</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan (UU 25/2004)	I-6
Gambar I.2 Alur Pikir Penyusunan RPJPD .....	I-7



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG.**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim (RPJP Kabupaten Muara Enim) merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan (2005-2025).

Dokumen tersebut memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan RPJP Kabupaten Muara Enim didasarkan pada kondisi obyektif, potensi riil, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah dengan merangkum seluruh aspirasi masyarakat di Kabupaten Muara Enim serta mempertimbangkan segala konsekuensi di masa mendatang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Penyusunan RPJP Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim merupakan serangkaian proses mulai dari pembuatan rancangan awal rencana pembangunan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Hasil Musrenbang tersebut dijadikan masukan dalam menyusun rancangan akhir rencana pembangunan yang selanjutnya diajukan kepada DPRD Kabupaten Muara Enim untuk disahkan dan dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJP Kabupaten Muara Enim disusun dengan maksud sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk 20 tahun mendatang. Dokumen ini juga akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dalam menyusun RPJM Kabupaten Muara Enim dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan.

RPJP Kabupaten Muara Enim disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

### **1.3. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2007-2025 adalah sebagai berikut:

#### **1. Landasan Idiil**

Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.

#### **2. Landasan Konstitusional**

Undang-Undang Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

#### **3. Landasan Operasional**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- b. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- c. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124)
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286)

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 5 tahun 2003 tentang Perencanaan Stratejik (Renstra) Kabupaten Muara Enim tahun 2003 – 2008
- g. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437)
- i. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438)
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah
- l. Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

#### **1.4. HUBUNGAN RPJP KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

RPJP Kabupaten Muara Enim mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar rencana pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Muara Enim., Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, swasta, dan segenap warga masyarakat dalam upaya mengisi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

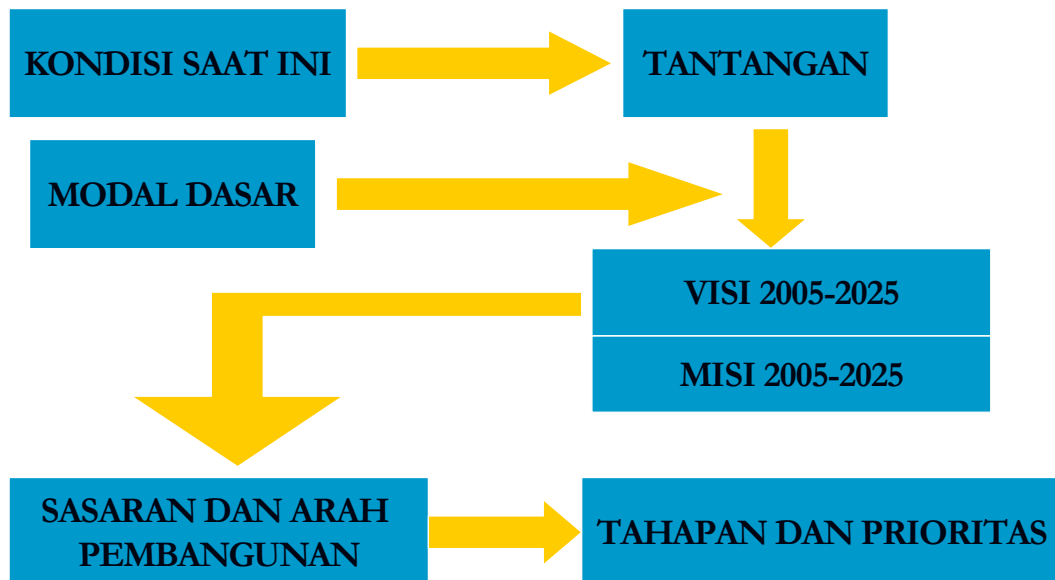
Dalam proses penyusunannya, RPJP Kabupaten Muara Enim dibuat dengan mengacu kepada RPJP Propinsi Sumatera Selatan dan RPJP Nasional dan selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan dokumen-dokumen pembangunan lainnya yang merupakan hasil integrasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan regional dan sektoral. Rencana pembangunan yang termuat di dalam RPJP Kabupaten Muara Enim merupakan rencana jangka panjang dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan, baik regional maupun sektoral dengan kemungkinan adanya penyempurnaan.



## I.5. ALUR PIKIR

Gambar I.2

### ALUR PIKIR PENYUSUNAN RPJPD



## I.6. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJP Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penyusunan dan pengertian RPJP Kabupaten Muara Enim, proses penyusunan RPJP Kabupaten Muara Enim, maksud dan tujuan penyusunan RPJP Kabupaten Muara Enim, landasan hukum, hubungan RPJP Kabupaten Muara Enim dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

## **Bab II Kondisi Umum dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang**

### **Daerah**

Kondisi umum menguraikan berbagai aspek pembangunan seperti sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik dan demokrasi, keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tantangan jangka panjang daerah menguraikan beberapa tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan dalam aspek-aspek seperti tersebut di atas.

## **Bab III Visi, Misi, Sasaran, Arah, Dan Tahapan Pembangunan**

Menjelaskan visi pembangunan daerah atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan jangka panjang daerah dan misi pembangunan daerah atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Dalam bab ini dijelaskan pula arah dan tahapan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

## **Bab IV Penutup**



## **BAB II**

### **KONDISI UMUM**

Kabupaten Muara Enim berdasarkan letak geografis berada di wilayah strategis karena merupakan daerah lintasan dari berbagai kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatera. Topografi Kabupaten Muara Enim terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Bentangan wilayah dengan topografi tersebut menimbulkan terbentuknya banyak bukit dan sungai. Sebagian besar wilayah Kabupaten Muara Enim (41,3 persen) terletak pada kemiringan lereng  $3^{\circ} - 12^{\circ}$  dan 34,4 persen berada pada kemiringan  $0^{\circ} - 30^{\circ}$ . Daerah yang berada pada kemiringan lereng  $12^{\circ}-40^{\circ}$  sebanyak 9,45 persen, sedangkan daerah dengan kemiringan lebih besar dari  $40^{\circ}$  seluas 10,3 persen. Daerah pegunungan/ perbukitan dengan tebing-tebing yang curam mengapit celah-celah lembah berada di sebelah Selatan sebagai rangkaian anak Bukit Barisan.

Hasil pengamatan Klimatologi, di Kabupaten Muara Enim suhu udara rata-rata adalah  $23^{\circ} \text{ C} - 24^{\circ} \text{ C}$ . Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, kondisi topografi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan lokasi. Selama tahun 2006 curah hujan berkisar antara 50 – 350 mm.

Kecamatan Muara Enim dan Semendo memiliki curah hujan rata-rata 117mm/ bulan (Agustus) – 414 mm/ bulan (Januari).

Bulan basah 11-12 bulan/ tahun dan bulan lembab 0-1 bulan/ tahun (Cara Mohr) dengan tipe iklim A atau sangat basah (cara Schmidt-Ferguson). Dengan tipe iklim yang demikian, Kabupaten Muara Enim tidak mengalami defisit air. Dengan kapasitas air minimum pada bulan September sebesar 5 mm dan maksimum pada bulan Januari sebesar 211 mm dan total 1.124 mm / tahun, maka total ketersediaan air ini cukup untuk memenuhi segala aktivitas kegiatan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Curah hujan yang berada pada kisaran normal dan luasnya DAS, dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan produksi di sektor pertanian; antara lain, pada sub sektor perkebunan dan perikanan.

## **II.1. KONDISI SAAT INI**

### **A. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

1. Kualitas kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH), angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup), angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 persalinan) dan status gizi. Pada tahun 2006, AHH kabupaten Muara Enim sebesar 66 tahun 9 bulan, meningkat sebesar 1 tahun 1 bulan dari AHH tahun 2002 (65 tahun 8 bulan). Sebagai perbandingan, secara rata-rata nasional AHH Indonesia pada tahun 2005 sebesar 69 tahun.

Pada tahun 2004 di Kabupaten Muara Enim jumlah kematian bayi sebanyak 57 bayi per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan secara rata-rata nasional sebanyak 40 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Sementara angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Muara Enim sebesar 7 kematian ibu melahirkan. Persentase balita yang kurang gizi bahkan gizi buruk masih cukup tinggi. Pada tahun 2002 terdapat 11,75 persen balita gizi buruk dan menurun menjadi 7,21 persen pada tahun 2003. Balita dengan status gizi kurang adalah 15,16 persen pada tahun 2002 menurun menjadi 10,10 persen pada tahun 2003.

2. Kondisi pendidikan di Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK untuk SD adalah 101,04 pada tahun 2004 menurun menjadi 100,55 pada tahun 2006; APK untuk SMP 63,73 pada tahun 2004 meningkat menjadi 84,50 pada tahun 2006; APK untuk SMA 35,06 pada tahun 2004 meningkat menjadi 37,22 pada tahun 2006. APM untuk SD 86,30 pada tahun 2004 menurun menjadi 86,08 pada tahun 2006; APM untuk SMP 49,39 pada tahun 2004 meningkat menjadi 46,63 pada tahun 2006; APM untuk SMA 24,10 pada tahun 2004 meningkat menjadi 28,24 pada tahun 2006. Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Muara Enim tahun 2006 adalah sebesar 98,6 turun 0,2 poin dari tahun 2005. Penduduk yang masih buta aksara sebagian adalah penduduk usia lanjut dan

penduduk yang secara geografis sulit menjangkau sarana dan prasarana pendidikan. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 0,1 poin yaitu 7,3 dibandingkan tahun 2004 yang mencapai angka 7,2. Masih rendahnya RLS Muara Enim sangat dipengaruhi oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

3. Selama periode 2000-2006 jumlah penduduk di Kabupaten Muara Enim meningkat sebesar 1,43 persen per tahun dari 598.678 jiwa di tahun 2000 menjadi 649.731 jiwa di tahun 2006. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki perempuan relatif berimbang. Penduduk tersebar di 22 kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 71,08 jiwa/Km<sup>2</sup>. Namun demikian sampai dengan tahun 2006 penduduk lebih terkonsentrasi di 4 (empat) Kecamatan yaitu Lawang Kidul (9,08 persen), Talang Ubi (8,94 persen), Muara Enim (8,15 persen) dan Gunung Megang (7,86 persen). Luas wilayah keempat kecamatan tersebut kurang dari 25 persen luas wilayah kabupaten Muara Enim. Konsentrasi penduduk di empat wilayah ini lebih disebabkan karena daya tarik sosial ekonomi yang cukup tinggi, yaitu sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan kabupaten yang mempunyai sarana dan prasarana yang lebih memadai dibandingkan kecamatan lainnya.

4. Bila dilihat berdasarkan struktur umur penduduk, pada tahun 2006 sebanyak 31,8 persen penduduk Muara Enim adalah penduduk usia muda dan 2,86 persen adalah penduduk usia lanjut, dan penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah 65 persen. Angka *dependency ratio* pada tahun 2006 sebesar 48,99 persen, angka ini menurun dibandingkan *dependency ratio* pada tahun 2000 yang sebesar 72,07 persen, ini menggambarkan kondisi kependudukan Muara Enim yang semakin membaik dan kondusif bagi pembangunan daerah kabupaten Muara Enim.
  
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim pada tahun 2006 mencapai 69,1 poin, meningkat sebesar 3,3 poin dari tahun 1996 sebesar 65,8 poin. Berdasarkan ranking IPM untuk Provinsi Sumatera Selatan, Muara Enim berada pada posisi ke 7 di tahun 2005, sementara di tahun 1996 menempati posisi ke 3. Untuk ranking IPM nasional Muara Enim menempati posisi ke 228 di tahun 2005, sementara di tahun 1996 menempati posisi ke 151.
  
6. Pemberdayaan perempuan telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari semakin membaiknya kualitas hidup perempuan. Dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH), perempuan mencapai 68,38 tahun sedangkan laki-laki 64,13 tahun (tahun 2005). Di bidang pendidikan, perempuan juga telah menunjukkan tingkat partisipasinya.

Angka Partisipasi Kasar pada tingkat SMA, perempuan mencapai 28,31 sedangkan laki-laki hanya 20,43. Angka Partisipasi Murni (APM) dari jenjang SLTP dan SMA, perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tingkat SLTP Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan sebesar 65,80 dan APM laki-laki hanya 51,50. APM perempuan pada tingkat SMA mencapai 25,11 sedangkan laki-laki hanya 18,30. Demikian juga pada tingkat pendidikan yang ditamatkan, perempuan yang tamat SLTP, SMA dan Akademi / Universitas lebih banyak dibandingkan laki-laki (contohnya pada jenjang Universitas perempuan mencapai 7,73 persen dan laki-laki hanya 1,58 persen, hasil olahan data Susenas 2003 dan 2003). Walaupun demikian pemberdayaan perempuan masih harus ditingkatkan, kemajuan di bidang pendidikan masih memisahkan persoalan pada tingginya angka buta huruf pada perempuan. Pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang amat penting dalam rangka perlindungan terutama berkaitan dengan hak-hak dasar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

7. Dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Muara Enim tahun 2006 yang tergolong generasi muda (berusia 15 tahun sampai dengan 44 tahun) berjumlah 332.972 orang atau sebesar 51,25 persen dari total penduduk 649.731 orang. Dari jumlah tersebut 160.796 laki-laki atau 49,55 persen dari total penduduk laki-laki 324.527 orang dan 172.176

perempuan atau sebesar 52,94 persen dari total penduduk perempuan yang berjumlah 325.204 orang.

8. Pembinaan terhadap generasi muda di Kabupaten Muara Enim dilakukan melalui berbagai organisasi kepemudaan. Sampai saat ini jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 31 buah.
9. Pemberlakuan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang sangat akomodatif pada peran dan fungsi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kewenangan urusan wajib dan pilihan membawa semangat baru dalam memotivasi partisipasi masyarakat baik individu maupun kelompok dalam kegiatan pembangunan.  
Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam lembaga adat perlu disikapi secara terbuka sebagai penyemangat dan penyangga proses pembangunan di daerah.
10. Bidang keagamaan di Muara Enim pada tahun 2006, dilihat dari jumlah pemeluknya menunjukkan bahwa Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk, yaitu sebesar 99,15 persen, Kristen sebesar 0,63 persen, Budha sebesar 0,14 persen dan Hindu 0,08 persen.

11. Penyebaran penduduk beragama Islam relatif merata di seluruh kecamatan. Sementara penduduk beragama lainnya terkonsentrasi pada kecamatan-kecamatan tertentu seperti di Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Lubai, Talang Ubi, Gunung Megang, Lembak dan Rambang Dangku.
  
12. Sarana peribadatan di wilayah Kabupaten Muara Enim secara umum sudah cukup baik dan merata di tiap wilayahnya. Saat ini di kabupaten Muara Enim terdapat 548 unit mesjid, 130 unit musholla, 15 unit gereja, 4 unit pura dan 3 unit vihara.

## **B. EKONOMI**

1. Sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim meningkat sebesar 21,9 persen yaitu Rp.33.494.774.774 pada tahun 2005 menjadi Rp.40.559.662.855 pada tahun 2006. Sampai dengan tahun 2006, Pendapatan Asli Daerah telah memberikan kontribusi sebesar 6,18 persen dari total realisasi anggaran. Penerimaan PAD ini berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp.11.105.963.744 (27,38 persen); retribusi daerah sebesar Rp.8.309.108.316 (20,49 persen); bagian laba usaha daerah sebesar Rp.2.631.871.588 (6,49 persen) dan penerimaan lainnya sebesar



Rp. 18.512.719.207 (45,64 persen). Dana perimbangan tahun 2006 mencapai Rp.548.701.304.528,55 (83,66 persen). Penerimaan ini terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 105.432.057.044 (19,21 persen); Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 125.147.468.864 (22,81 persen); Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 287.002.999.992 (52,31 persen); Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.20.528.700.000 (3,74 persen) dan Dana Perimbangan dari Provinsi sebesar Rp.10.590.078.628,55 (1,93 persen). Pendapatan lainnya pada tahun 2006 sebesar Rp.9.885.587.926,44. Ini berarti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari pembiayaan dari pusat berupa dana perimbangan.

2. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim yang tercermin dalam kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata-rata selama kurun waktu 2001-2006 atas dasar harga konstan 2000 dengan migas adalah sebesar 3,51 persen pertahun. Pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi relatif bervariasi, pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Pertanian (10,19 persen) dan terendah dialami oleh sektor Pertambangan dan Penggalian (3,48 persen).
3. Bila dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi dalam membentuk PDRB, maka Kabupaten Muara Enim bertumpu pada 4 sektor ekonomi yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan

Galian, Industri Pengolahan, serta Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2006 keempat sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDRB di atas 90 persen.

4. Hasil perhitungan dengan menggunakan Location Quotient (LQ) menunjukkan bahwa dalam periode 2000-2005 sektor unggulan yang menjadi basis potensi ekonomi sektoral kabupaten Muara Enim terdapat pada 6 (enam) sub sektor antara lain: sub sektor tanaman bahan makanan (1,008), sub sektor kehutanan (1,044), sub sektor pertambangan tanpa migas (5,880), sub sektor minyak dan gas bumi (1,754), sub sektor listrik (1,019), dan sub sektor angkutan rel (3,236). Sementara itu, sektor industri pengolahan, sektor keuangan dan persewaan masih belum menjadi sektor basis (unggulan).
5. Struktur ekonomi Kabupaten Muara Enim dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 relatif tidak mengalami perubahan yang berarti karena masih didominasi oleh sektor primer. Adapun rata-rata kontribusi sektor ini (Pertanian dan Pertambangan) dalam PDRB adalah 76,97 persen. Namun apabila dicermati, kontribusi sektor primer terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim memperlihatkan trend yang menurun. Sebaliknya sektor tersier walaupun meningkat dalam persentase yang kecil tetapi menunjukkan trend yang meningkat.

Pada tahun 2001 kontribusi sektor tersier sebesar 11,35 persen dan meningkat menjadi 11,98 persen pada tahun 2006.

6. Pada tahun 2001 pendapatan per kapita Kabupaten Muara Enim dengan migas sebesar Rp 7.898.093,-, sedangkan tanpa migas sebesar Rp 4.633.566. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor Pertambangan (migas) masih dominan dalam mendorong pendapatan Kabupaten Muara Enim. Pertumbuhan pendapatan per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu Rp 8.590.683 (migas) dan Rp 5.238.163 (tanpa migas) atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,53 persen dan 4,24 persen dari tahun sebelumnya.
  
7. Luas panen sub sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2006 adalah: padi sawah luas panen 17.265 Ha, padi ladang dengan luas panen 16.107 Ha, padi lebak dengan luas panen 17.753 Ha; palawija dengan luas panen 2.812 Ha (jagung 769 ha, ketela pohon 639 ha, ketela rambat 172 ha, kacang tanah 289 ha, kacang hijau 914 ha, kedele 29); sayuran dengan luas panen 2.222 Ha dan buah-buahan dengan luas panen 3.155 Ha. Produksi padi pada tahun 2006 mencapai 187.325 ton Gabah Kering Giling (padi sawah 58.823 ton, padi ladang 50.611 ton, padi lebak 80.856 ton). Produksi jagung sebesar 2.322 ton, ketela pohon 8.027 ton, ketela rambat 2.235 ton, kacang tanah 372 ton, kacang hijau 1.100 ton, dan kedele 31 ton.

Produksi buah-buahan di antaranya jeruk 67.086 ton, pisang 47.290 ton, nenas 33.202 ton, mangga 9.713 ton, nangka 8.811 ton, durian 5.202 ton, dan pepaya 3.867 ton.

Produksi sayuran di antaranya terong 1.401 ton, cabai 967 ton, kacang panjang 959, dan tomat 730 ton.

8. Pada tahun 2006 terjadi penurunan luas tanaman karet dari 169.811 Ha (tahun 2005) menjadi 168.407 Ha (0,83 persen), sedangkan produksinya meningkat (19,24 persen) yakni dari 159.134,1 ton menjadi 189.743,9 ton. Pola yang sama terjadi pada tanaman kopi. Luas tanaman kopi menurun sebesar 11,23 persen dari 24.260 Ha menjadi 21.536 Ha namun produksinya meningkat menjadi 26.454,7 ton dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 18.244 ton. Kondisi yang berbeda terjadi pada tanaman kelapa sawit, luas lahannya tahun 2005 adalah 47.239 Ha menjadi 49.206 Ha atau 4,16 persen (tahun 2006). Sementara produksinya menurun dari 213.625,3 ton (tahun 2005) menjadi 179.876,2 (tahun 2006) ton atau 15,8 persen.
9. Pertumbuhan produksi hasil peternakan dalam kurun waktu 2003-2006 Kabupaten Muara Enim mengalami kenaikan setiap tahun dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 0,23 persen. Sub sektor peternakan yang terdapat pada Kabupaten Muara Enim meliputi peternakan besar dan kecil. Semua jenis ternak besar mengalami

peningkatan populasi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada populasi sapi sebesar 0,13 persen, kerbau sebesar 0,37 persen, dan kuda sebesar 11,87 persen.

Populasi ternak kecil seperti kambing juga mengalami peningkatan sebesar 0,27 persen tetapi domba mengalami penurunan populasi sebesar 6,99 persen. Begitu pula dengan seluruh jenis ternak potong seperti domba, kerbau, kambing dan sapi mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 159,64 persen, 14,14 persen, 4,54 persen, dan 4,96 persen. Populasi unggas juga mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun lalu, populasi ayam ras meningkat 3,78 persen, ayam buras 7,01 persen dan itik 0,02 persen. Sedangkan untuk pemotongan unggas juga mengalami peningkatan antara lain : ayam kampung 0,07 persen, ayam ras 3,83 persen dan itik 0,20 persen. Usaha perikanan di daerah Kabupaten Muara Enim hanya berupa usaha perikanan darat, yang terdiri dari penangkapan ikan di perairan umum dan budi daya pemeliharaan ikan di kolam, keramba dan sawah. Produksi perikanan pada tahun 2006 berjumlah 6.446,90 ton, terdiri 3.936,90 ton produksi hasil penangkapan dan 2.510,00 ton produksi budidaya perikanan. Dibandingkan tahun lalu total produksi mengalami peningkatan 0,04 persen. Peningkatan ini berasal dari produksi budidaya perikanan sebesar 0,57 persen, dan produksi hasil penangkapan mengalami penurunan sebesar 0,30 persen.

10. Ketahanan pangan Kabupaten Muara Enim bila dilihat dari persediaan dan kebutuhan beras selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2003 – 2006) menunjukkan trend menurun pada jumlah persediaan yaitu 114.526 ton pada tahun 2003 menjadi 100.631 ton pada tahun 2006. Sedangkan kebutuhan beras menunjukkan trend meningkat yaitu 85.170 ton pada tahun 2003 menjadi 90.159 ton pada tahun 2006. Hal ini berarti bahwa dalam periode waktu tersebut masih terjadi surplus dalam persediaan pangan.
11. Dalam kurun 2002-2006 produksi minyak dan gas bumi terus mengalami peningkatan, jika pada tahun 2002 produksi migas sebesar 4.792.300 barrel, maka pada tahun 2006 meningkat menjadi 5.568.604 barrel, sedangkan untuk produksi gas bumi pada tahun 2002 sebesar 57.412.600 kemudian meningkat menjadi 61.941.432 MBTU pada tahun 2006. Sampai saat ini kuasa pertambangan dilakukan oleh PT. Pertamina dan mitra usaha dengan pola *Technical Assistant Contract* dan *Joint Operation Body*.
12. Jumlah produksi batubara Kabupaten Muara Enim dari tahun 2001-2006 relatif stabil. Pada tahun 2001 jumlah produksinya sebanyak 7.687.045 ton, sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 7.173.470 ton. Sebagian besar merupakan produksi yang dihasilkan oleh PT.BA.

Produksi batubara Kabupaten Muara Enim memberikan kontribusi yang besar terhadap konsumsi domestik dan ekspor batubara Propinsi Sumatera Selatan. Jumlah batubara yang diekspor pada tahun 2006 sebanyak 3.165.012 ton, pasaran domestik di luar wilayah Sumatera Selatan sebanyak 6.397.022 ton dan di dalam wilayah Sumatera Selatan sebanyak 1.221.210 ton.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2005), perubahan volume pemasaran untuk masing-masing wilayah pemasaran tersebut adalah sebagai berikut : untuk ekspor meningkat sebesar 26,98 persen; di luar daerah Sumatera Selatan meningkat sebesar 18,53 persen dan dalam wilayah Sumatera Selatan menurun sebesar 1,07 persen. Jumlah produksi batubara tahun 2006 mencapai 6.373 ton, terdiri dari pasaran domestik di luar wilayah Sumatera Selatan 4.033 ton dan dalam wilayah Sumatera Selatan 2.012 ton.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu untuk masing-masing wilayah pemasaran tersebut, untuk daerah luar Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 34,99 persen.

13. Jumlah hotel yang terdapat di Kabupaten Muara Enim sebanyak 16 hotel yang menyebar di tiga kecamatan, dengan rincian 5 hotel terdapat di Kecamatan Lawang Kidul, 8 hotel di Kecamatan Muara Enim dan 3 hotel terdapat di Kecamatan Talang Ubi.

14. Inflasi menurut lapangan usaha pada tahun 2006 telah mencapai dua digit (15,64 persen). Inflasi tertinggi terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,04 persen, kemudian urutan kedua adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi (19,65 persen). Sementara itu sektor yang menunjukkan inflasi yang cukup tinggi yaitu sektor Perdagangan dan Perhotelan, Industri Pengolahan, dan Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih masing-masing 13,04, 10,55 dan 9,85 persen.

### **C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

1. Dari sisi kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan IPTEK. di Kabupaten Muara Enim terjadi peningkatan, hal ini tercermin dengan mulai dimanfaatkannya teknologi serta berbagai hasil penelitian pengembangan dan rekayasa teknologi oleh masyarakat pada berbagai bidang
2. Walaupun telah terjadi peningkatan pemanfaatan tetapi belum memadai untuk mendorong percepatan pembangunan secara optimal
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kabupaten Muara Enim; juga mulai dibudayakan penggunaan Teknologi informasi dalam bentuk *Cyber-net* (internet) terutama untuk pelajar di semua jenjang pendidikan.



#### **D. SARANA DAN PRASARANA**

1. Jenis transportasi darat yang merupakan transportasi utama di Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari angkutan jalan raya dan angkutan kereta api. Oleh karena itu, jalan merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar kegiatan ekonomi maupun sosial penduduknya selain kereta api.

Peningkatan pembangunan juga akan makin meningkatkan fungsi jalan untuk mempermudah mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas orang dan barang.

2. Panjang jalan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2005 mencapai 1.798,31 Km yang terdiri dari jalan negara 191,22 Km, jalan propinsi 217,09 Km dan jalan kabupaten sepanjang 1.390 Km. Sementara panjang jalan pada tahun 2006 untuk seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim menjadi 1.618,46 Km; terdiri dari jalan negara 191,22 Km; jalan propinsi 217,09 Km dan jalan kabupaten sepanjang 1.210,15 Km.
3. Dilihat dari kondisi jalan, pada tahun 2004 untuk jalan negara terdapat 11,22 Km yang dalam keadaan rusak, jalan propinsi terdapat 15 Km yang rusak dan 70 Km yang rusak berat dan untuk jalan kabupaten terdapat 304,85 km rusak dan 133,59 km yang rusak berat. Kondisi jalan kabupaten sudah mulai diperbaiki pada tahun 2005 dan 2006,

sehingga kondisinya sudah lebih baik. Pada tahun 2006 jalan dengan kondisi baik meningkat dari 556 Km menjadi 830,55 Km.

4. Panjang jalan untuk jalan negara dari tahun 2004 sampai tahun 2006 tidak mengalami peningkatan, begitu juga dengan jalan propinsi. Kondisi tahun 2004, 2005 dan 2006 tetap. Untuk jalan kabupaten, panjang jalan mengalami peningkatan pada tahun 2005, di mana pada tahun 2004 panjang jalan adalah 1.209,15 km dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 1.396,00 km. Artinya terjadi peningkatan 186,85 km. Peningkatan jalan-jalan kabupaten ini sangat besar artinya untuk membuka akses ke wilayah pedesaan.

Kelancaran arus transportasi, terutama dari pedesaan yang sebagian besar menggunakan jalan kabupaten ini akan sangat berarti bagi kelancaran arus barang dan penumpang sehingga dapat menunjang peningkatan kegiatan ekonomi penduduk. Penduduk bisa dengan mudah mengangkut hasil pertaniannya ke lokasi pemasaran.

5. Selain jalan, di Kabupaten Muara Enim prasarana yang juga sangat menunjang kelancaran transportasi darat adalah jembatan. Banyak jembatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pemeliharaannya dalam rangka memperlancar arus transportasi darat ini. Berdasarkan data yang ada, jumlah dan panjang jembatan untuk jalan negara dan jalan propinsi tidak mengalami perubahan dari tahun

2006 ke tahun 2007. Sedangkan untuk jalan kabupaten terjadi penambahan jumlah dan panjang jembatan di mana pada tahun 2005 jumlah jembatan adalah 147 unit dengan panjang total 2.384,50 m maka pada tahun 2006 jumlah jembatan adalah 193 unit dengan panjang total 4.064,50 m

6. Melalui sistem perpipaan air bersih sudah dapat melayani konsumen terutama di kawasan perkotaan. Jumlah pelanggan yang paling besar adalah rumah tangga, yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih, Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus berusaha untuk meningkatkan penyediaan air bersih. Jumlah air bersih yang disalurkan pada tahun 2006 berjumlah 3.182.953 meter kubik, atau naik 9,02 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 2.919.477 meter kubik.
  
7. Penggunaan terbanyak dari air bersih yang disalurkan adalah untuk rumah tangga, yaitu sekitar 86,27 persen dari total air bersih yang disalurkan. Penggunaan lainnya adalah untuk toko, industri, perusahaan swasta serta instansi kantor pemerintah. Untuk kawasan perdesaan pelayanan air bersih perpipaan dari PDAM belum banyak dinikmati penduduk. Penduduk perdesaan masih banyak menggunakan sumber air dari sungai untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, untuk peningkatan kualitas hidup penduduk perdesaan diperlukan sistem penyediaan air bersih perdesaan dengan menggunakan sistem pengolahan mini yang bisa mencukupi kebutuhan air bersih skala desa. Pengelolaan air bersih ini bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri.

8. Saluran drainase sangat diperlukan untuk mengatasi masalah banjir dan genangan terutama di kawasan perkotaan. Saluran drainase ini digunakan untuk pembuangan air hujan dan air limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Perlu dilakukan upaya untuk penyusunan masterplan drainase untuk kawasan perkotaan supaya sistem pembuangan air hujan bisa dilakukan dengan lancar dan tidak menimbulkan genangan atau banjir. Kabupaten Muara Enim belum memiliki irigasi teknis. Sebagian besar kawasan pertanian masih menggunakan sawah setengah irigasi teknis, sawah irigasi sederhana dan sawah tadah hujan.

Luas sawah dengan jenis irigasi tersebut 30,90 persen berada di Kecamatan Tanjung Agung dan selebihnya masing-masing berada di kecamatan Semende darat Laut (17,83 persen), Semende Darat Ulu (20,51 persen) dan Semende Darat Tengah (30,75 persen).

9. Prasarana listrik terutama sudah dapat melayani kawasan perkotaan. Daya terpasang pembangkit listrik PLTU selama tiga tahun terakhir

tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 272.600,00 MWh. Tenaga listrik yang dihasilkan selama tahun 2006 berjumlah 1.853.521,496 MWh, atau sekitar 0,23 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 1.849.198.400 MWh.

Dari total tenaga listrik yang didistribusikan selama tahun 2006, sebanyak 1.532.991,817 didistribusikan ke luar wilayah Kabupaten Muara Enim, sebanyak 150.858,135 MWh untuk Kabupaten Muara Enim dan selebihnya digunakan untuk perusahaan itu sendiri.

10. Jumlah pelanggan listrik rumah tangga merupakan bagian terbesar dari seluruh pelanggan listrik yang ada yaitu 95,81 persen pada tahun 2003 dan 95,62 persen pada tahun 2006. Pelanggan sosial berjumlah 1,29 persen pada tahun 2003 dan telah meningkat proporsinya dalam tahun 2006 menjadi 1,38 persen.

Sementara itu, jumlah pelanggan perkantoran, niaga dan industri hampir mencapai 3 persen pada tahun-tahun tersebut, sedangkan untuk penerangan jalan hanya 0,065 persen pada tahun 2003 dan meningkat sedikit saja pada tahun 2006 menjadi 0,07 persen. Apabila mengamati jumlah produksi listrik yang ada di kabupaten Muara Enim nampak bahwa selama tahun 2003-2005 telah terjadi penurunan sebesar 14,16 persen dimana pada tahun 2003 PT PLN telah memproduksi listrik sebesar 163.528.092 MWH sedangkan pada tahun 2005 adalah 140.376.227 MWH. Kawasan perdesaan masih

memerlukan peningkatan pelayanan jaringan listrik terutama di daerah yang terpencil. Peningkatan listrik perdesaan bisa dilakukan dengan berbagai upaya antara lain dengan memperluas jaringan listrik, mencari sumber energi listrik di daerah setempat atau penggunaan solarsel. Penyediaan listrik perdesaan akan meningkatkan produktivitas penduduk perdesaan.

11. Prasarana telepon untuk kabupaten Muara Enim saat ini sudah cukup terlayani. Selain sambungan kabel, saat ini system telepon nir kabel sudah cukup terlayani sampai ke kota-kota kecamatan. Pengembangan prasarana telekomunikasi ini akan menunjang kegiatan sosial ekonomi penduduk, karena semakin mudahnya penduduk untuk berkomunikasi jarak jauh, sehingga menghemat waktu dan biaya. Pada tahun 2003 jumlah kapasitas Satuan Sambungan Telepon di Kabupaten Muara Enim adalah 8.942 SST dan meningkat menjadi 9.234 SST pada tahun 2006 (terjadi peningkatan sebesar 3,27 persen). Adapun Kapasitas tersebut berada di STO Muara Enim (41,15 persen pada tahun 2003 dan 40,63 persen pada tahun 2006), STO Tanjung Enim (41,15 persen dan 41,11 persen pada tahun 2003 dan 2006) dan STO Pendopo Talang Ubi mengalami peningkatan kapasitas SST sebesar 0,57 persen pada tahun 2003 dan 2006.

12. Dari ketiga STO tersebut, jumlah pelanggan telepon pada STO Tanjung Enim pada tahun 2006 mengalami peningkatan paling besar yaitu 4,06 persen dibandingkan tahun 2003, sedangkan STO Muara Enim dan Pendopo Talang Ubi walaupun kecil tetapi juga mengalami peningkatan jumlah pelanggan yaitu masing-masing adalah 1,39 persen dan 1,02 persen pada periode yang sama. Sementara itu pada tahun 2006 jumlah wartel yang ada di STO Muara Enim meliputi 55,74 persen (34 wartel) dari seluruh wartel yang ada pada ketiga STO tersebut, STO Pendopo Talang ubi memiliki 15 wartel sedangkan pada STO Tanjung Enim terdapat 12 wartel. Dari jumlah tersebut yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2005 adalah STO Pendopo Talang Ubi, sedangkan STO Muara Enim dan Tanjung Enim justru mengalami penurunan jumlah wartel sebesar 12,82 persen dan 36,84 persen.

#### **E. POLITIK DAN DEMOKRASI**

1. Semakin terbukanya sarana partisipasi politik di daerah dan praktek penyelenggaraan Pemilu Presiden secara langsung, turut mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Pada pemilu 2004 dari 406.600 penduduk yang memiliki hak pilih, 326.314 pemilih atau 80,26 persen menggunakan hak pilihnya. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi.

2. Hasil pemilu 2004, 10 (sepuluh) partai politik berhasil menempatkan kadernya di DPRD, PDIP dan Golkar sama-sama memperoleh 11 (sebelas) kursi, PBB memperoleh 2 (dua) kursi, PKB dan PNBK masing-masing 1 (satu) kursi. Stabilitas politik cukup terjaga dengan baik, hal ini ditandai dengan tidak munculnya konflik-konflik politik yang mengganggu ketentraman masyarakat. Kondisi ini patut dijaga terutama dalam menghadapi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PLKADA) langsung tahun 2008.
  
3. Digantikannya UU No. 22 tahun 1999 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, mengindikasikan adanya niat yang sangat positif untuk mengembangkan demokrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Secara tegas dan jelas hubungan pemerintah pusat dan daerah sangat mengkomodir peran dan kedudukan pemerintah daerah dengan menitikberatkan pada azas desentralisasi dalam NKRI.
  
4. Kewenangan pemerintah daerah juga telah ditindaklanjuti melalui PP Nomor 38 tahun 2007, yang secara rinci memuat kewenangan wajib dan pilihan bagi pemerintah daerah. PP ini menunjukkan sebuah pengakuan bahwa pemerintah daerah diberi keleluasan sesuai dengan kemampuannya untuk mengelola urusan keuangan daerah.



5. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah melengkapi UU Nomor 32 tahun 2004 dalam rangka mendorong perkembangan demokrasi melalui pengelolaan daerah secara mandiri dan mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya.
  
6. Dalam rangka penerapan demokrasi UU Nomor 32 tahun 2004 telah mengatur tentang Pilkada, sebagai gerbang penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik. Selama kurun waktu 2005-2025, akan diselenggarakan Pilkada sebanyak 4 kali yaitu tahun 2008, 2013, 2018, dan 2023. Kehadiran KPUD sebagai penyelenggara pemilu di daerah menunjukkan niat pemerintah untuk menghadirkan lembaga yang independen dan menjamin proses Pilkada secara demokratis.

## **F. KEAMANAN**

1. Kondisi keamanan di Kabupaten Muara Enim relatif baik, walaupun demikian angka kriminalitas masih relatif sering terjadi. Gangguan keamanan dan ketertiban dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi pada tahun 2006 sebanyak 713 tindak kriminal, dengan rasio rata-rata angka kriminal per 10.000 penduduk adalah 11.

2. Upaya menciptakan kondisi yang aman tidak hanya dilakukan oleh pihak keamanan, baik TNI maupun POLRI tetapi juga dilakukan oleh masyarakat.

## **G. HUKUM DAN APARATUR**

1. Dalam era reformasi, terjadi perubahan peran DPRD yang cukup signifikan dalam kehidupan perpolitikan di daerah. Perubahan yang ada dimaksudkan untuk *check and balance* dan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. DPRD tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah daerah, tetapi telah ditempatkan sebagai lembaga legislatif yang sesungguhnya.
2. Selama kurun waktu pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 22 tahun 1999 dan telah digantikan dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004, produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD berupa Peraturan Daerah cukup banyak terutama berkaitan dengan Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Setda/ Dinas/ Lembaga Tehnis Daerah di lingkungan kabupaten Muara Enim. Perubahan struktur organisasi tidak lain sebagai konsekuensi pelaksanaan kewenangan daerah yang sangat luas berdasarkan kedua UU diatas. Selain Perda tentang pembentukan organisasi perangkat daerah, Perda tentang pajak dan retribusi daerah juga sangat mewarnai hasil kinerja pemerintah daerah dan DPRD.

3. Substansi Perda memperlihatkan bahwa inisiatif Rancangan Perda hampir seluruhnya berasal dari eksekutif (baik dari dinas, badan dan kantor). Sedangkan aspek teknis yuridisnya dipersiapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
  
4. Organisasi perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 2 (dua) asisten, 14 (empat belas) dinas, 6 (enam) badan, dan 9 (sembilan) kantor. Wilayah Pemerintahan terbagi ke dalam 22 (dua puluh dua) Kecamatan, 287 desa dan 16 kelurahan (Muara Enim Dalam Angka 2006). Pembentukan organisasi perangkat daerah masih menggunakan PP No. 84 tahun 2000, yang sebetulnya telah digantikan dengan nomor PP nomor 8 tahun 2003.  
  
Namun PP tersebut mengalami penundaan pelaksanaan, hingga dikeluarkannya PP nomor 41 tahun 2007 tentang penyusunan organisasi Perangkat daerah. Untuk itu perlu biaya Pemerintah daerah Muara Enim menyesuaikan organisasi Perangkat daerah sesuai nomor PP nomor 41 tahun 2007.
  
5. Dimulai pada tahun 2000, terjadi pengalihan pegawai secara besar-besaran sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan yang luas. Lebih luas, termasuk didalamnya pengalihan PNS guru SLTP dan SLTA yang dulunya PNS Pusat dengan berlakunya UU nomor 22 tahun 1999 menjadi PNS daerah.

Jumlah PNS hingga tahun 2007 (koordinasi bulan Oktober) mencapai 7584 orang dengan komposisi 603 PNS atau 7,95 persen tersebar dari eselon II hingga eselon V, 5380 PNS atau 70,93 persen adanya tenaga fungsional dan 1504 PNS atau 19,83 persen adalah staf. Jika dilihat berdasarkan golongan sebagai berikut: golongan IV sebanyak 1030 orang (13,58 persen), golongan III sebanyak 4914 orang atau 64,79 persen, golongan II sebanyak 1562 atau 20,59 persen, dan golongan I sebanyak 78 orang atau 1,03persen. Sebaran tingkat pendidikan secara berturut-turut dari yg terbanyak sebagai berikut :

D2 (30,77 persen), SLTA (29,91 persen), S1 (22,46 persen), D3 (7,61 persen), D1 (4,14 persen), SLTP (2,30 persen), SD (1,94 persen), S2 (0,89 persen) dan S3 (0,02 persen).

6. Pelayanan yang dilakukan oleh SKPD dalam bentuk *public regulations* kepada masyarakat sampai saat ini dirasakan belum optimal, hal ini dapat terlihat dari masih lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan dan biaya administrasi yang dikeluarkan belum sesuai dengan standard yang telah ditetapkan, sehingga dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

## **H. WILAYAH DAN TATA RUANG**

1. Wilayah seluas 7.488,72 km<sup>2</sup> atau 81,06 persen dari luas Kabupaten Muara Enim, berada pada ketinggian kurang dari 100 meter dari permukaan laut. 5 (lima) kecamatan berada pada ketinggian lebih dari 100 meter dari permukaan laut, yaitu: Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul.
  
2. Wilayah kabupaten Muara Enim dilalui Sungai Enim dan Sungai Lematang. Kedua sungai ini melewati Kecamatan Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Megang, Rambang Dangku, Tanah Abang, Sungai Rotan dan masuk ke wilayah Musi Banyuasin. Anak-anak sungai Enim meliputi Air Beringin, Air Meo, Air Enim Tengah, Air Enim Tak Berikan, Air Enil, Air Bangke, Air Ual, Air Belinau, Air Tiyahan, Air Kelawas dan Air Samad karenanya untuk wilayah kabupaten Muara Enim terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 85.000 ha. Cukup luasnya DAS di Kabupaten Muara Enim menyebabkan beberapa Kecamatan merupakan daerah rawan bencana, khususnya bencana banjir, seperti bencana banjir yang baru-baru ini terjadi di Kecamatan Talang Ubi. Bencana banjir juga biasanya melanda beberapa kecamatan pada saat musim penghujan.

3. Posisi ibukota Muara Enim yang terletak di bagian Selatan wilayah Kabupaten dan berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lahat, bisa dianggap masih terlalu jauh untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terletak di bagian Utara Kabupaten Muara Enim. Pemerataan pembangunan perlu dilakukan untuk wilayah-wilayah bagian Utara dan bagian Barat.
  
4. Sesuai dengan potensi dan kondisi perkembangan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, maka kebijaksanaan spasial Kabupaten Muara Enim saat ini dibagi dalam 6 (enam) wilayah pembangunan sebagai berikut :
  - a. Wilayah Pembangunan I  
Wilayah Pembangunan I mempunyai pusat pengembangan utama Kota Tanjung Enim serta pusat pengembangan sekunder, Sugirawas dan Pulau Panggung merupakan wilayah pengembangan kawasan lindung, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan perhubungan.
  
  - b. Wilayah Pembangunan II  
Wilayah Pembangunan II, dengan pusat pengembangan utama Kota Muara Enim serta pusat pengembangan sekunder Ujan Mas, Gunung Megang dan Cinta Kasih merupakan wilayah pengembangan galian golongan C, pariwisata, perdagangan, industri dan jasa, serta pendidikan dan kebudayaan serta olahraga.

c. Wilayah Pembangunan III

Wilayah Pembangunan III, dengan pusat pengembangan utama Kota Talang Ubi serta pusat pengembangan sekunder Simpang Babat dan Tanah Abang merupakan wilayah pengembangan tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri.

d. Wilayah Pembangunan IV

Wilayah Pembangunan IV, dengan pusat pengembangan utama Kota Beringin merupakan wilayah pengembangan kawasan kehutanan, perkebunan, peternakan dan industri.

e. Wilayah Pembangunan V

Wilayah Pembangunan V, dengan pusat pengembangan utama Kota Prabumulih serta pusat pengembangan sekunder Tebat Agung merupakan wilayah pengembangan perkebunan, perikanan, peternakan, industri, serta perdagangan dan jasa.

f. Wilayah Pembangunan VI

Wilayah Pembangunan VI, dengan pusat pengembangan utama Kota Gelumbang serta merupakan wilayah pengembangan kehutanan, perkebunan, tanaman pangan. Perikanan, industri dan pariwisata dan perhubungan.

5. Pengendalian implementasi penataan dan penggunaan ruang wilayah Kabupaten Muara Enim saat ini masih belum dilakukan secara sinergi. Sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

maka pengendalian pelaksanaan Penataan Ruang perlu dilakukan secara lebih terencana dan terkendali mengingat sanksi bagi pelanggaran cukup berat. Pengendalian penataan ruang perlu dilakukan melalui koordinasi lintas instansi.

6. Beberapa kawasan perkotaan dan kawasan di dalam wilayah Kabupaten Muara Enim masih belum memiliki Rencana Tata Ruang sebagai acuan dalam Penataan Ruang.

## **I. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

1. Sumberdaya lahan di Kabupaten Muara Enim sebagian besar penggunaannya untuk hutan seluas 370.710 ha (38,94 persen), lahan perkebunan seluas 283.577 ha (29,79 persen), lahan persawahan 29.342 ha (3,08 persen), lahan tidur 39.414 ha (4,14 persen), dan areal lain seluas 135.469 ha (14,23 persen). Peruntukkan lahan sampai saat itu relatif belum mengacu kepada RTRW.

Pengelolaan pertanian saat ini masih mengutamakan penggunaan pupuk dan obat-obatan anorganik yang relatif tidak menguntungkan bila dilihat dari fungsi ekologis.

2. Batubara, minyak, gas bumi, gas metana batu bara dan sumberdaya panas bumi (geotermal) merupakan lima sumber daya alam yang dominan di Kabupaten Muara Enim. Pemanfaatan sumber daya alam



belum berdampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengeksploitasian sumber daya alam tersebut sudah diupayakan untuk memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, antara lain dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

3. Sumber daya air dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan, di antaranya untuk sumber energi, pertanian, bahan baku air minum dan lain-lain. Pasokan sumberdaya air untuk berbagai kebutuhan tersebut sangat ditentukan oleh debit air, debit air di Kabupaten Muara Enim sebesar 7,89 m/detik.

Sampai saat ini debit air relatif tidak stabil karena dipengaruhi oleh perubahan iklim dan kualitas wilayah hulu sungai. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan konversi lahan di wilayah hulu untuk berbagai peruntukan mempengaruhi kualitas di wilayah hulu daerah aliran sungai, sehingga menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai untuk pertanian dan PDAM. Selain itu terjadi pendangkalan di beberapa daerah aliran sungai.

## **II.2 TANTANGAN**

### **A. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

1. Pembangunan kesehatan dan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Guna mewujudkan sumberdaya yang berkualitas, maka di bidang kesehatan dihadapkan kepada tantangan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan gizi, mengurangi gangguan kesehatan baik yang disebabkan oleh penyakit, bencana, lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Sementara itu di bidang pendidikan tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, peningkatan APK SMA serta meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi serta menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara.

2. Meskipun pertumbuhan penduduk Muara Enim masih berada di bawah pertumbuhan penduduk nasional dan propinsi, tetapi masih perlu diupayakan untuk mengendalikan jumlah penduduk agar struktur penduduk relatif seimbang.

3. Pada aspek kehidupan beragama tantangan yang dihadapi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas moral dan keimanan masyarakat melalui pengaplikasian syariat agama dalam kehidupan sehari-hari

serta peningkatan kualitas sarana dan parasarana peribadatan. Tantangan di bidang agama berkaitan juga dengan upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kerukunan internal.

4. Secara ringkas tantangan yang dihadapi dalam bidang sosial budaya adalah upaya untuk :
- Meningkatkan kualitas kesehatan
  - Meningkatkan kualitas pendidikan
  - Mengendalikan pertumbuhan penduduk
  - Mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama

## **B. EKONOMI**

1. Meskipun sampai saat ini pembangunan ekonomi telah menghasilkan berbagai kemajuan, namun masih jauh dari yang diharapkan karena belum dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar dalam perekonomian daerah untuk 20 tahun mendatang adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dihadapkan pada tantangan bagaimana mencapainya dengan jalan mengembangkan potensi ekonomi lokal, baik melalui pengembangan sumberdaya pertanian maupun pertambangan yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tidak seperti selama ini. Pengembangan potensi perekonomian lokal diharapkan juga dapat mengerakkan sektor perekonomian lainnya.
  
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian dan pertambangan dihadapkan pada tantangan untuk mengupayakan agar nilai tambah (*added value*) dan daya saing komoditas tersebut dapat meningkat. Rendahnya nilai tambah sektor pertanian, menuntut upaya peningkatan industri hilir sistem agribisnis, sehingga dapat menghasilkan produk akhir pertanian yang berkualitas serta berdaya saing.
  
4. Pengembangan potensi ekonomi lokal, khususnya sektor pertambangan untuk sub sektor migas dapat dilakukan melalui peningkatan produksi, PLTG/*mini power plant*, gas kota dan industri hilir kimia serta industri pupuk. Sementara itu tantangan pada sub sektor pertambangan umum, meliputi pembangunan PLTU mulut tambang, transportasi batubara, gasifier batubara, *liquefaction*

batubara, briket batubara dan *upgraded brown coal*. Melalui upaya ini diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah serta dapat menggerakkan industri pengolahan lokal dan menyerap tenaga kerja, sehingga tidak hanya terbatas pada peningkatan dana bagi hasil.

5. Selain itu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, khususnya melalui peningkatan PAD, namun upaya ini tidak menutup kemungkinan untuk memantapkan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga perekonomian, antar wilayah maupun antar negara, baik pada tahap proses produksi maupun aspek pemasaran.
6. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan *good governance*, sehingga dapat mendorong investasi swasta untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Muara Enim serta meningkatnya efisiensi, baik pada tahap produksi maupun distribusi.

Tantangan di sektor Ekonomi adalah upaya untuk ;

- Meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita

- Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah
- Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dengan menerapkan *good governance*
- Mengoptimalkan dampak ganda pengelolaan SDA terhadap masyarakat
- Mewujudkan kerjasama dengan lembaga perekonomian, antar wilayah dan antar negara, baik pada tahap produksi maupun pemasaran

### **C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

1. Tantangan yang dihadapi dalam bidang IPTEK adalah bagaimana mengupayakan pemanfaatan hasil-hasil penelitian, penerapan IPTEK tepat guna dan pengembangan IPTEK untuk menunjang percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Guna mewujudkan keinginan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar dapat menguasai dan mengembangkan IPTEK tersebut.
2. Penerapan IPTEK tepat guna dan berbagai penelitian harus terus dilakukan, khususnya untuk budidaya hasil perkebunan dan pertanian yang telah menjadi *trademark* Kabupaten Muara Enim, seperti buah duku dan buah durian.

Kegiatan ini merupakan tantangan guna menjawab bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar berada di sektor pertanian.

3. Pengembangan penelitian dan penerapan hasil-hasil penelitian serta IPTEK dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, kerjasama antar wilayah dan kerjasama antar negara. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi 20 tahun ke depan agar Kabupaten Muara Enim memiliki daya saing, sehingga dapat berkompetisi dalam era globalisasi.

Tantangan yang dihadapi dalam IPTEK adalah:

- Penerapan dan pengembangan IPTEK tepat guna dalam mendukung percepatan pembangunan
- Melakukan berbagai penelitian dan menerapkannya, khususnya untuk budidaya pertanian agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat
- Kerjasama dengan berbagai lembaga, wilayah dan antar negara dalam mengembangkan IPTEK

#### **D. SARANA DAN PRASARANA**

1. Kebutuhan akan perumahan yang akan meningkat menuntut untuk penyediaan rumah yang sekaligus juga harus layak huni. Penataan kawasan permukiman dan peningkatan penyediaan infra struktur permukiman sangat diperlukan untuk menuju *city without slump*. Masih banyak daerah atau kawasan di dalam Kabupaten Muara Enim yang tingkat aksesibilitasnya masih rendah. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik maupun karena belum terjangkau oleh jaringan jalan.
2. Kapasitas pengolahan dan jaringan air bersih masih perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan penyediaan air bersih. Diharapkan target pelayanan air bersih bisa mencapai 80 persen penduduk pada 20 tahun ke depan. Penyediaan air bersih perdesaan masih perlu ditingkatkan, karena sebagian penduduk perdesaan masih belum menikmati pelayanan air bersih. Untuk peningkatan kualitas hidup penduduk perdesaan diperlukan sistem penyediaan air bersih perdesaan dengan menggunakan sistem pengolahan mini yang bisa mencukupi kebutuhan air bersih skala desa. Pengelolaan air bersih ini bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri.
3. Masalah pembuangan air hujan pada masa yang akan datang akan menjadi masalah yang cukup serius terutama di kawasan perkotaan.



Perlu dilakukan upaya untuk penyusunan *masterplan* drainase untuk kawasan perkotaan supaya sistem pembuangan air hujan bisa dilakukan dengan lancar dan tidak menimbulkan genangan atau banjir.

4. Sistem irigasi teknis perlu diupayakan untuk dapat dibangun di kawasan pertanian di Kabupaten Muara Enim, terutama di daerah produksi tanaman pangan. Sumber air dari sungai-sungai besar yang ada bisa digunakan sebagai cadangan untuk irigasi lahan persawahan.
5. Rasio elektrifikasi di Kabupaten Muara Enim Masih perlu ditingkatkan terutama untuk kawasan perdesaan. Desa-desa yang tidak terjangkau oleh sistem listrik dari jaringan PLN bisa dibuatkan sistem listrik perdesaan baik berupa PLTMH maupun PLTS.

Tantangan yang dihadapi di bidang sarana dan prasarana adalah :

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas
- Meningkatkan sarana dan prasarana penyediaan air bersih
- Meningkatkan elektrisitas
- Penataan kawasan untuk berbagai kegunaan/ fungsi

## **E. POLITIK**

1. Proses demokrasi yang sedang berjalan dan mencari bentuk yang sesuai dengan karakter budaya Indonesia yang heterogen dan budaya lokal yang cukup memberi pengaruh dalam kehidupan politik, perlu disikapi secara bijak. Tantangan terbesar tentunya adalah bagaimana proses tersebut berkelanjutan dan berada dalam jalur konstitusional. Tantangan secara riil dalam kehidupan politik meliputi proses reformasi struktur politik baik yang berada pada struktur pembuatan keputusan-keputusan daerah yaitu pemda, DPRD, Parpol maupun kelompok-kelompok massa.
2. Tuntutan masyarakat yang semakin tidak terbendung terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disikapi secara bijak. Segera dirumuskan mekanisme dan prosedur dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas, sebelum tantangan ini menjadi pemicu munculnya ketidakpuasan masyarakat yang akan merugikan proses demokrasi. Dengan adanya keterbukaan dalam kehidupan politik, melahirkan dan mendorong masyarakat untuk semakin aktif dalam mengikuti perkembangan politik yang terjadi daerah maupun di tingkat nasional. Tantangan terbesar adalah bagaimana mewadahi partisipasi masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Untuk itu tantangan dalam merumuskan mekanisme partisipasi masyarakat, sangat urgen untuk ditindak lanjuti.

3. Tantangan politik yang lain adalah mendorong kapasitas partai politik yang memiliki kepengurusan di daerah, untuk, melaksanakan fungsinya dengan optimal yaitu pendidikan politik bagi masyarakat, menjalik komunikasi yang seimbang baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah daerah, melaksanakan rekruiemen yang benar-benar profesional.

Tantangan di bidang Politik Kabupaten Muara Enim adalah :

- Berlanjutnya proses demokrasi
- Mewujudkan mekanisme dan prosedur dalam menerapkan tranparansi dan akuntabilitas
- Meminimalisasi kemungkinan konflik sebagai akibat proses politik
- Mengoptimalkan pemahaman politik yang baik

## **F. KEAMANAN**

1. Tantangan di bidang keamanan sangat berkaitan dengan berjalannya proses demorasi politik yang sedang berjalan. Kesetiaan yang sempit pada golongan tertentu dapat memicu konflik di dalam masyarakat. Berbagai contoh daerah yang telah menyelenggarakan Pilkada, diikuti dengan konflik-konflik yang berkepanjangan dan meresahkan

kehidupan masyarakat secara umum maupun menghambat pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu perlu diantisipasi sedini mungkin tantangan ini.

2. Begitupula dengan proses politik lainnya, misalnya keinginan untuk melakukan pemekaran, baik kecamatan, kabupaten maupun propinsi yang akan menimbulkan sikap pro dan kontra terhadap keinginan tersebut yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan. Aspirasi ini menjadi tantangan bagi pihak eksekuti maupun legislatif untuk disikapi secara arif dan bijaksana.
  
3. Selain Pilkada menjadi salah satu yang dapat berpotensi melahirkan konflik, kehidupan sosial masyarakat yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga dapat menjadi pemicu lahirnya kerusuhan yang pada gilirannya akan mengganggu keamanan.

Tantangan di bidang keamanan adalah :

- Menciptakan kestabilan keamanan dalam kehidupan sehari-hari
- Menciptakan rasa aman dalam kegiatan politik, antara lain Pilkadaes dan Pilkada
- Menciptakan kondisi aman dalam menyikapi aspirasi pembentukan kabupaten dan propinsi baru

## **G. HUKUM DAN APARATUR**

1. Tuntutan perubahan birokrasi yang kondusif untuk praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sangat berkaitan dengan persoalan hukum. Jaminan hukum perlu ditegakkan untuk menghindari konflik politik dan menjaga keamanan kehidupan bermasyarakat.
2. Untuk itu aparatur juga harus disiapkan sesegera mungkin untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan untuk melahirkan aparat yang responsif dan memahami pelayanan prima pada masyarakat cukup besar. Pelayanan publik telah menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Peningkatan kualitas aparatur daerah melalui pendidikan formal dan pelatihan perlu dilakukan agar pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Melihat kondisi yang ada sekarang, maka latar belakang pendidikan aparatur daerah masih banyak yang perlu ditingkatkan, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemda untuk mengatasi kondisi tersebut. Merubah birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima sangat mendesak, terutama untuk mempercepat dan mempersingkat prosedur bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Tantangan di bidang Hukum dan Aparatur Kabupaten Muara Enim adalah mewujudkan kepastian hukum dalam seluruh aspek yaitu :

- Mewujudkan birokrasi yang kondusif untuk praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (pengoptimalan fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan)
- Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum

## **H. WILAYAH DAN TATA RUANG**

1. Kesenjangan pertumbuhan antara perkotaan dan perdesaan perlu diantisipasi dengan pembangunan perdesaaan terutama permukiman perdesaan untuk mengurangi urbanisasi. Pengembangan kawasan perdesaan dilakukan melalui upaya pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan infra struktur sesuai standar pelayanan minimum.
2. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang yang sudah ada dan disesuaikan dengan UU Nomor 26 tahun 2007 tersebut. Selain itu untuk kawasan-kawasan yang bersifat khusus bisa direncanakan secara lebih detail.
3. Perencanaan Struktur Ruang di masa yang akan datang secara lebih optimal merupakan tantangan yang harus dapat diwujudkan, antara lain dapat dilakukan melalui :

a. Sistem Kota-kota

- Menetapkan Kecamatan Muara Enim-Tanjung Enim sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- Menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat kegiatan di bagian utara dan tenggara.
- Mengembangkan secara terbatas pusat-pusat kegiatan di bagian selatan.
- Menata distribusi PKL: Tanjung Agung, Beringin, Pendopo, Betung, Gelumbang.

b. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- Meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan transportasi yang ada.
- Mewujudkan keseimbangan tata air.
- Meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada.
- Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi.
- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman

c. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

Berdasarkan nilai LQ (*Location Quation*) maka ditetapkan rencana pengembangan kawasan strategis yaitu :

- Daerah Tanjung Enim di Kecamatan Lawang Kidul sebagai Kawasan Pertambangan.

- Daerah Semende, daerah Gelumbang, dan daerah Talang Ubi untuk perkebunan lahan kering.

d. Pengembangan Kawasan Khusus

Kawasan-kawasan yang dikembangkan ini merupakan eks "Marga"1 yaitu meliputi 4 wilayah, yaitu:

- Wilayah Marga Panang Ulung Puluh di Kecamatan Tanjung Agung.
- Wilayah Marga Lubai I di Kecamatan Lubai.
- Wilayah Marga Petulai Belimbing di Kecamatan Gunung Megang.
- Wilayah Marga Kertamulia di Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Sungai Rotan.

Dan terhadap eks marga lainnya akan dikembangkan dan mendapatkan perlakuan serta perhatian yang sama sebagaimana empat (4) wilayah eks marga diatas yang akan termuat dalam RPJM.

4. Pengembangan Pola Ruang terdiri dari :

a. Pengembangan Kawasan Lindung

- Pengesahan kawasan lindung
- Rehabilitasi lahan kritis.
- Pengendalian kawasan lindung dari ancaman konversi lahan.
- Pengembangan partisipasi masyarakat.
- Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
- Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung.



b. Pengembangan Kawasan Budidaya meliputi:

- Pertanian Lahan Basah (Sawah)
  - Mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis.
  - Intensifikasi
  - Mengembangkan infrastruktur sumberdaya air.
- Pertanian Lahan Kering yang diarahkan pada daerah yang cocok dengan tujuan antara lain:
  - Meningkatkan produksi
  - Pembangunan lintas sektor
  - Upaya pelestarian sumber daya alam
  - Meningkatkan pendapatan masyarakat.
  - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional
  - Menciptakan kesempatan kerja.
  - Meningkatkan ekspor.
- Pengembangan kawasan budidaya hutan produksi yang diarahkan pada lokasi Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Lubai, dan Kecamatan Gunung Megang.
- Pengembangan kegiatan pertambangan yang diarahkan pada lokasi-lokasi yang sudah mendapat izin yaitu:
  - Migas berlokasi di Kecamatan Talang Ubi, Gunung Megang dan Lubai.
  - Batubara berlokasi di Kecamatan Tanjung Agung.
  - Andesit berlokasi di Kecamatan Tanjung Agung.

- Batu Kali berlokasi di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Gunung Megang, dan Lubai.
- Energi panas bumi berlokasi di Kecamatan Semendo.
- Pengembangan kegiatan agro industri yang diarahkan pada lokasi Kecamatan Lubai, Tanjung Agung, Gelumbang, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Talang Ubi.
- Pengembangan kegiatan permukiman yang diarahkan pada lokasi pusat-pusat pertumbuhan (pusat kegiatan).

Tantangan di bidang Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim adalah :

- Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah
- Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah
- Memantapkan struktur tata ruang dan pengembangan pola tata ruang (penataan tata ruang untuk berbagai peruntukan)

## **I. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN**

1. Tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam adalah bagaimana mengupayakan agar terpenuhinya tuntutan untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Implikasi dari pernyataan ini adalah bagaimana mengupayakan pemanfaatan sumberdaya alam dari sisi ekonomi secara optimal dengan tanpa mengabaikan fungsinya secara ekologis, Misalnya penambangan

batubara yang menjadikan "kolong-kolong baru" yang terus akan terjadi merupakan tantangan bagaimana upaya pengelolaannya untuk hutan raya.

2. Pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada sektor pertanian dan pertambangan sampai saat ini, khususnya sektor pertambangan tidak terlalu banyak memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pada masa yang akan datang, khususnya berkaitan dengan ditetapkannya Sumsel sebagai lumbung energi menimbulkan tantangan yang besar bagi Kabupaten Muara Enim, bagaimana mengupayakan agar kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan secara signifikan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal, khususnya melalui pengembangan nilai tambah sub sektor migas dan sektor pertambangan umum.
3. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai untuk pertanian dan PDAM. Tantangan bagi pemerintah daerah adalah bagaimana mengupayakan agar kawasan lindung tetap terpelihara dan menormalisasi DAS akibat pendangkalan yang disebabkan oleh rusaknya wilayah hulu.

Tantangan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kabupaten Muara Enim adalah :

- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan aspek keberlanjutan
- Melakukan normalisasi aliran sungai
- Mengoptimalkan dampak ganda pengelolaan sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
- Memanfaatkan peluang investasi yang meliputi:
  - Pembangunan PLTU Mulut Tambang
  - Pembangunan transportasi batubara
  - Peningkatan produksi Gasifier batubara, Liquefaction batubara, Briket batubara, dan Upgraded Brown Coal, dan lain-lain.
  - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB).

### **II.3. MODAL DASAR**

Modal dasar pembangunan daerah adalah keseluruhan sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan daerah Kabupaten Muara Enim dalam pembangunan daerah, yaitu:

1. Kabupaten Muara Enim berdasarkan letak geografis berada di wilayah strategis karena merupakan daerah lintasan dari berbagai kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatera. Topografi Kabupaten Muara Enim terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi.

Bentangan wilayah dengan topografi tersebut menimbulkan terbentuknya banyak bukit dan sungai. Kabupaten Muara Enim memiliki tipe iklim A atau sangat basah (cara Schmidt-Ferguson). Dengan tipe iklim yang demikian, Kabupaten Muara Enim tidak mengalami defisit air. Dengan kapasitas air minimum pada bulan September sebesar 5 mm dan maksimum pada bulan Januari sebesar 211 mm dan total 1.124 mm / tahun, maka total ketersediaan air ini cukup untuk memenuhi segala aktivitas kegiatan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Curah hujan yang berada pada kisaran normal serta luasnya DAS dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan produksi di sektor pertanian, baik yang bersifat tradisional maupun perkebunan besar, budidaya perikanan serta pengembangan energi alternatif.

2. Sampai saat Kabupaten Muara Enim masih sangat tergantung pada kemampuan mendayagunakan sumberdaya alam yang dimiliki seperti migas dan bahan tambang galian, di samping sumberdaya alam lahan yang potensial untuk pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan. Modal pembangunan Kabupaten Muara Enim yang bertumpu pada sumber daya alam mengharuskan kita untuk memperhatikan bagaimana pemanfaatan sumber daya ini dapat didayagunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat Kabupaten Muara Enim.

3. Penduduk pada tahun 2006 berjumlah 649.731 jiwa juga merupakan modal dasar dalam penyediaan tenaga kerja yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim.
  
4. Berdasarkan potensi Sumberdaya yang dimiliki oleh kabupaten Muara Enim, baik di sektor pertanian dan pertambangan, jumlah penduduk, kondisi alam dan cuaca serta letak daerah yang strategis merupakan modal dasar untuk melaksanakan pembangunan. Guna dapat mengoptimalkan modal dasar tersebut harus ditunjang dengan IPTEK dan SDM yang berkualitas, kerjasama dengan berbagai lembaga regional dan internasional, pembangunan industri pengolahan yang bersinergi antara hulu dan hilir yang sekaligus akan meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **VISI, MISI, SASARAN, ARAH, DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN**

#### **III.1. VISI**

### **KABUPATEN MUARA ENIM YANG SEHAT, MANDIRI DAN SEJAHTERA**

- **SEHAT**

Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sehat baik jasmani maupun rohani yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan fisik, rohani, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas serta terciptanya lingkungan yang sehat.

- **MANDIRI**

Kabupaten Muara Enim yang mandiri bertumpu pada sumberdaya lokal, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, berdaya saing, bersinergi dengan lembaga regional dan internasional dan daerah lainnya serta didukung oleh tersedianya SDM berkualitas, tersedianya dana pembangunan dari sumber sendiri, infrastruktur dan lembaga pemerintahan yang memadai serta kepastian hukum, sehingga sejajar dengan daerah lain.

- **SEJAHTERA**

Masyarakat Muara Enim yang sejahtera ditandai oleh terpenuhinya hak-hak dasar penduduk, meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang layak, perumahan, lingkungan yang bersih, kehidupan beragama, kehidupan politik, keamanan dan kenyamanan serta pengembangan diri ke arah yang lebih baik.

### **III.2. MISI**

- **VISI SEHAT DIWUJUDKAN MELALUI MISI SEBAGAI BERIKUT:**

- a. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani
- b. Mewujudkan masyarakat yang sehat rohani

- **VISI MANDIRI DIWUJUDKAN MELALUI MISI SEBAGAI BERIKUT:**

- a. Mewujudkan pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal
- b. Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) berkualitas
- c. Mewujudkan lembaga pemerintahan yang baik
- d. Mewujudkan perekonomian yang mempunyai daya saing tinggi

- **VISI SEJAHTERA DIWUJUDKAN MELALUI MISI SEBAGAI**

**BERIKUT:**

- a. Mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi hak-hak dasar
- b. Mewujudkan masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri



### **III.3. SASARAN**

- **SASARAN SEHAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**
  - a. Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani
  - b. Terwujudnya masyarakat yang sehat rohani
  
- **SASARAN MANDIRI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**
  - a. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis sumberdaya lokal (pertanian dan pertambangan) secara berkelanjutan
  - b. Terwujudnya pengembangan industri pengolahan yang berbasis pertanian
  - c. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
  - d. Terwujudnya struktur perekonomian yang semakin proporsional
  - e. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan RTRW
  - f. Terwujudnya kerjasama antar lembaga, daerah dan antar negara
  - g. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK
  - h. Terwujudnya dana pembangunan dari sumber penerimaan lokal (peningkatan PADS)
  - i. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan memadai
  - j. Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik
  - k. Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik
  - l. Terwujudnya kepastian hukum
  - m. Terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis.

• **SASARAN SEJAHTERA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

- a. Terwujudnya masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan) yang layak
- b. Terwujudnya masyarakat yang sehat
- c. Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan
- d. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang layak
- e. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai lingkungan yang bersih
- f. Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik
- g. Terwujudnya masyarakat yang taat menjalankan syariat agama
- h. Terwujudnya keamanan dalam masyarakat
- i. Terwujudnya masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri.

**III.4. ARAH PEMBANGUNAN**

• **ARAH PEMBANGUNAN SEHAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

- a. Meningkatkan penyediaan kebutuhan sandang, pangan dan papan
- b. Mendorong terciptanya masyarakat yang bermoral, berbudi luhur dan berakhlak mulia
- c. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- d. Mendorong peran serta masyarakat untuk berperilaku sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat

- **ARAH PEMBANGUNAN MANDIRI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**
  - a. Mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal (pertanian dan pertambangan) secara berkelanjutan
  - b. Mendorong terwujudnya pengembangan industri pengolahan yang berbasis pertanian
  - c. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
  - d. Mendorong berkembangnya ekonomi sektoral yang lebih proporsional
  - e. Mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai dengan RTRW
  - f. Mendorong perekonomian daerah yang memiliki keunggulan kompetitif
  - g. Mendorong terciptanya sinergi antar lembaga, wilayah, daerah dan antar negara dengan perekonomian lokal
  - h. Mendorong tumbuh dan berkembangnya SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK
  - i. Menyediakan dana pembangunan yang bersumber dari penerimaan lokal (intensifikasi dan ekstensifikasi PADS)
  - j. Menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan memadai
  - k. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah
  - l. Mendorong terciptanya pemerintahan yang baik
  - m. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
  - n. Mendorong terlaksananya kepastian hukum
  - o. Mendorong kehidupan yang lebih demokratis.

• **ARAH PEMBANGUNAN SEJAHTERA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

- a. Merwujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan pangan dan kelayakan sandang serta papan
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan (peningkatan sarana dan prasarana kesehatan)
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan (peningkatan sarana dan prasarana pendidikan)
- d. Mendorong peningkatan daya beli masyarakat
- e. Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat
- f. Menyediakan lingkungan yang bersih
- g. Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik
- h. Membangun masyarakat yang taat menjalankan syariat agama
- i. Meningkatkan kualitas keamanan dalam masyarakat
- j. Membentuk masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri.

### **III.5. TAHAPAN PEMBANGUNAN**

Berdasarkan arahan tersebut maka pembagian tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Muara Enim akan diklasifikasikan sebagai berikut :

#### **1) Tahap 1 RPJM I 2005-2010**

- Memprioritaskan Pembangunan Pada Aspek **Pemenuhan Kebutuhan Dasar** (Kehidupan Beragama, Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Keamanan, Kehidupan Berpolitik), Lembaga Kepemerintahan, Infrastruktur, Sumber Penerimaan Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar.

#### **2) Tahap 2 RPJM II 2011-2015**

- Memprioritaskan Pembangunan Pada Aspek **Pertumbuhan** Ekonomi Lokal Melalui Kerjasama Antar Lembaga, Antar Wilayah, Peningkatan Kualitas SDM dan Iptek, Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Lembaga Kepemerintahan, Sumber Penerimaan Daerah, Pendapatan Masyarakat)

#### **3) Tahap 3 RPJM III 2016-2020**

- Memprioritaskan Pembangunan Pada Aspek **Pengembangan** Ekonomi Lokal Yang Kompetitif Yang Ditopang Oleh Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga, Antar Wilayah, Peningkatan Kualitas

SDM Dan Iptek, Peningkatan Infrastruktur, Lembaga pemerintahan, Sumber Penerimaan Daerah, Pendapatan Masyarakat)

**4) Tahap 4 RPJM IV 2021-2025**

- Memprioritaskan Pembangunan Pada Aspek **Pemantapan** Ekonomi Lokal, sehingga memiliki daya saing Melalui Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga, Antar Wilayah, Peningkatan Kualitas Sdm Dan Iptek, Peningkatan Infrastruktur, Kelembagaan, Sumber Penerimaan Daerah, Pendapatan Masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara enim sebagai **pedoman** bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi **koridor** dalam penyusunan visi, misi dan program **calon kepala** daerah dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rencana pembangunan lima tahunan) dan rencana kerja pemerintah daerah (rencana pembangunan tahunan).